



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Juli 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAEDHOWI OKTAFIDIA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 964472

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/48 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 158.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
2. MOTOR, HONDA GL 200 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BT2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.037.616.154

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.515.616.154

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.515.616.154

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.